AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v4i3.7757

IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENGATASI PENINGKATAN KASUS HIV DI KOTA PADANG

Implementation of Health Office Strategies in Addressing the Rise of HIV Cases in Padang City

Raudhatul Jannah & Adil Mubarak
Universitas Negeri Padang
raudhatuljannah816@gmail.com; adilmubarak@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 20, 2025	Oct 11, 2025	Oct 23, 2025	Oct 28, 2025

Abstract

The high number of HIV cases in Padang City, despite the implementation of various policies and intervention programs, serves as the background for this study. The aim is to analyze the implementation of strategies by the Padang City Health Office in addressing the rise in HIV cases, based on Mayor Regulation No. 23 of 2018 on HIV and AIDS Control. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. Informants include officials from the Health Office, community health center staff, and representatives from relevant NGOs. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing, with source triangulation to enhance validity. The findings indicate that the Health Office has implemented strategies through health promotion programs, Prevention of Sexual Transmission (PMTS), Voluntary Counseling and Testing (VCT) services, and adolescent education initiatives. However, the implementation of these policies has not been optimal due to limitations in human resources and funding, uneven communication, and bureaucratic complexity. Based on the policy implementation

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

theory by Amir and George C. Edward III, it is found that successful implementation is influenced by communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. Therefore, strengthening strategies is essential through participatory communication, capacity building for health workers, bureaucratic streamlining, and the utilization of digital media and community-based approaches to enhance the effectiveness and sustainability of HIV/AIDS control programs in Padang City.

Keywords: Implementation; Strategy; Factors; HIV/AIDS; Padang City

Abstrak: Tingginya jumlah kasus HIV di Kota Padang meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan telah diterapkan menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mengatasi peningkatan kasus HIV berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan, petugas puskesmas, dan mitra LSM yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Kesehatan telah dijalankan melalui program promosi kesehatan, Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS), layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), dan peningkatan pengetahuan remaja. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, komunikasi yang belum merata, serta birokrasi yang panjang. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Amir dan George C. Edward III, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan strategi melalui peningkatan komunikasi partisipatif, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyederhanaan birokrasi, serta pemanfaatan media digital dan pendekatan komunitas untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Padang.

Kata Kunci: Implementasi; Strategi; Faktor; HIV/AIDS; Kota Padang.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap individu karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Menurut (Ekayamti et al., 2023), kesehatan adalah aset berharga yang menentukan produktivitas dan kesejahteraan manusia. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sering kali menyebabkan munculnya berbagai permasalahan kesehatan, termasuk penyakit menular yang dapat berdampak luas terhadap masyarakat. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah HIV dan AIDS, yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh

manusia dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi fatal apabila tidak ditangani dengan baik. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sel darah putih dan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi (Kemenkes, 2020). Orang yang terinfeksi HIV berpotensi mengidap Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), yang merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik bersama, serta penularan dari ibu ke anak selama kehamilan atau menyusui (Yanti et al., 2020). Dengan karakteristik penularan yang kompleks dan tingkat kesadaran yang masih rendah, HIV menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan di Indonesia.

Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga disebut sebagai fenomena gunung es karena jumlah kasus yang terlapor masih jauh lebih sedikit dibandingkan kasus sebenarnya di masyarakat (Mahy et al., 2021). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat sebanyak 57.299 kasus HIV dan 16.410 kasus AIDS pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 terdapat 52.955 kasus HIV dan 9.341 kasus AIDS (Kemenkes, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penderita HIV berasal dari kelompok usia produktif antara 20 hingga 49 tahun yang rentan terhadap perilaku berisiko seperti hubungan seksual tanpa pengaman dan penggunaan narkoba suntik. Ironisnya, kasus penularan juga mulai ditemukan pada anak-anak berusia 1–4 tahun akibat transmisi dari ibu ke anak. Berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, penyebaran HIV/AIDS telah mencakup 463 kabupaten/kota di seluruh Indonesia atau sekitar 90,07% wilayah administratif negara ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa HIV bukan lagi isu kesehatan terbatas pada kelompok tertentu, tetapi telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan penanganan strategis dan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah (Hasibuan et al., 2024).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang turut mengalami peningkatan signifikan kasus HIV/AIDS dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, terdapat tiga daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu Kota Padang sebanyak 311 kasus, Kota Bukittinggi sebanyak 105 kasus, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 36 kasus. Kota Padang menjadi daerah dengan angka penderita HIV/AIDS tertinggi di provinsi ini. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kalangan berisiko tinggi seperti pekerja seks dan pengguna narkoba suntik, tetapi

juga telah merambah ke kalangan ibu rumah tangga serta remaja yang mulai menunjukkan perilaku berisiko (Suci Frisnoiry et al., 2024). Pemerintah Kota Padang sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang mencakup kegiatan promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, serta rehabilitasi. Namun, meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan, angka kasus HIV di Kota Padang tetap menunjukkan tren peningkatan, yang menandakan bahwa implementasi strategi pencegahan dan penanggulangan belum berjalan secara efektif. Hal ini diperkuat dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang (2025) yang menunjukkan jumlah kasus HIV dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi mencapai 333 kasus pada tahun 2023 dan 311 kasus pada tahun 2024.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang meliputi tiga program utama, yakni Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS), layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing), dan peningkatan pengetahuan remaja. Program PMTS difokuskan pada edukasi kelompok berisiko tinggi agar menerapkan perilaku seksual yang aman, sementara layanan VCT bertujuan mendeteksi kasus sejak dini dan memberikan konseling yang sesuai bagi individu yang terinfeksi HIV. Selain itu, program peningkatan pengetahuan remaja dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan peer educator di sekolah-sekolah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Kesehatan, diketahui bahwa upaya edukasi masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan beberapa wilayah seperti Air Tawar belum mendapatkan sosialisasi mengenai HIV. Minimnya promosi kesehatan dan belum meratanya edukasi menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV. Hal serupa terjadi di lingkungan sekolah, di mana guru di SMA Pertiwi 1 Padang mengungkapkan bahwa belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai HIV yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun Dinas Kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mengatasi peningkatan kasus HIV berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mengatasi peningkatan kasus HIV diimplementasikan di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan alami berdasarkan pengalaman serta pandangan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Menurut (Sugiyono, 2021), penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna suatu peristiwa atau kebijakan berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan program-program seperti Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS), layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT), serta edukasi dan promosi kesehatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu 2 Agustus sampai 27 September 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Dinas Kesehatan, petugas puskesmas, guru sekolah, masyarakat, serta ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), guna memahami efektivitas strategi yang diterapkan serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan daerah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di provinsi tersebut, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan kesehatan daerah dalam menekan laju peningkatan kasus HIV.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program HIV/AIDS. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang, serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, seperti pejabat Dinas Kesehatan, petugas puskesmas, dan masyarakat, guna memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan ini membantu

peneliti dalam menyusun gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan strategi Dinas Kesehatan, efektivitas program yang dijalankan, serta hambatan yang menyebabkan peningkatan kasus HIV di Kota Padang belum dapat ditekan secara optimal.

HASIL

Implementasi Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Kota Padang

Pelaksanaan strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mengatasi peningkatan kasus HIV didasarkan pada pedoman nasional penanggulangan HIV/AIDS yang menekankan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Strategi utama yang dijalankan ialah melalui program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) yang berfokus pada edukasi kepada kelompok berisiko tinggi seperti pekerja seks, laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), dan pengguna napza suntik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Hayani, SKM selaku pemegang program HIV di Dinas Kesehatan Kota Padang,

"kami melakukan sosialisasi langsung ke lapangan, terutama di daerah dengan populasi kunci, untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan kondom dan pentingnya pemeriksaan HIV secara rutin." Ungkap Ibu Fitri

Program ini juga melibatkan tenaga kesehatan dan kader masyarakat dalam menyampaikan pesan kesehatan reproduksi dan bahaya HIV/AIDS. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat menganggap pembahasan mengenai seksualitas dan HIV sebagai hal yang tabu, sehingga tingkat partisipasi belum optimal.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kegiatan PMTS bervariasi antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Di wilayah seperti Padang Barat dan Padang Selatan, kegiatan penyuluhan relatif lebih diterima karena adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan yang aktif. Sementara di daerah pinggiran, kegiatan serupa sering kali mendapat penolakan karena dianggap bertentangan dengan nilai sosial setempat. Sekretaris Dinas Kesehatan, Dewi Sartika, SKM, MPH menjelaskan,

"pelaksanaan program PMTS memang tidak mudah, karena masih ada masyarakat yang menolak informasi tentang HIV. Kami harus hati-hati agar edukasi tetap tersampaikan tanpa menyinggung nilai sosial." Ungkap Ibu Dewi

Hal ini menunjukkan keterbatasan dana operasional menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara rutin. Berdasarkan dokumentasi Renstra Dinas Kesehatan, kegiatan PMTS di tahun 2023 baru mencakup 68% dari target populasi kunci. Hal ini menunjukkan bahwa strategi sudah berjalan, tetapi masih belum merata di seluruh kecamatan.

Strategi berikutnya adalah pelaksanaan program Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penanggulangan HIV. Program ini menyediakan layanan konseling dan tes HIV sukarela di puskesmas maupun rumah sakit hingga di lapas. Berikut contoh dokumentasinya:



Gambar 1. Melakukan VCT di Lapas

Pada gambar 1 terlihat para dinas kesehatan bersama volunteer melakukan program VCT kepada para tahanan di Lapas. Dimana mereka selain dibekali ilmu juga dilakukan pengeccekan dan juga penangulangan HIV. Dan hal ini juga dilakukan di beberapa tempat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Betty Apriyeni, SKM, staf divisi penyakit menular,

"layanan VCT tersedia di setiap puskesmas utama, dan hasil tes bersifat rahasia. Tapi masyarakat masih banyak yang takut untuk datang karena takut diketahui orang lain." Ungkap Ibu Betty

Hal ini menunjukkan masih adanya stigma yang kuat di masyarakat. Selain itu, keterbatasan tenaga konselor menyebabkan beban kerja tinggi dan durasi layanan menjadi terbatas. Berdasarkan data sekunder dari laporan Dinas Kesehatan tahun 2024, hanya 10 dari 23 puskesmas yang aktif menjalankan VCT secara rutin. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat VCT menjadi penghambat utama peningkatan partisipasi dalam pemeriksaan dini.

Selain dua program utama tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang juga menjalankan program peningkatan pengetahuan remaja melalui kegiatan penyuluhan di sekolah. Berikut beberapa dokumentasinya:



Gambar 2. Program Pengetahuan Remaja

Dimana pada gambar 2 ini terlihat adanya sosialisasi sebagai bagian program pengetahuan remaja yang dilakukan di sekolah-sekolah. Dimana dalam hal ini dilakukan di SMA Pembangunan. Hasilnya banyak siswa-siswi yang tertarik dan aktif bertanya. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai bahaya HIV dan pentingnya perilaku hidup sehat. Fitri Hayani menjelaskan,

"kami rutin memberikan edukasi di sekolah-sekolah, terutama SMA, agar remaja memahami risiko hubungan seksual bebas dan penyalahgunaan narkoba suntik." Ungkap Ibu Fitri

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa faktor stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan. Salah satu pasien HIV yang diwawancarai menyampaikan *orang-orang langsung menjauh setelah tahu ketika ada yang positif HIV. Padahal HIV tidak menulari siapa pun, dan HIV tidak menular lewat bersentuhan* Sikap diskriminatif seperti ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program, tetapi juga menurunkan motivasi ODHA untuk mengikuti pengobatan. Menurut Reni Ilyas, petugas puskesmas Air Tawar bahwa *stigma itu sangat berat. Kadang pasien tidak mau datang kontrol karena takut diketahui tetangga.* Oleh karena itu, Dinas Kesehatan berupaya melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam setiap kegiatan penyuluhan agar pesan kesehatan dapat diterima lebih luas dan mengurangi persepsi negatif terhadap ODHA. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam menanggulangi HIV sudah berjalan sesuai kebijakan, namun efektivitasnya masih terbatas.

Faktor Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan dan penanggulan HIV Di Kota Padang

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Padang berjalan dengan cukup baik karena ditunjang oleh beberapa faktor pendukung yang kuat. Salah satu faktor utamanya adalah adanya regulasi yang jelas yang menjadi dasar pelaksanaan program. Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS memberikan landasan hukum yang tegas bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari sosialisasi, promosi kesehatan, hingga pelayanan VCT. Seperti yang diungkapkan oleh Staf Bidang Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang, Ibu Betty:

"Dasarnya jelas, kita ada Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2018 yang menjadi pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Padang. Jadi semua kegiatan, baik sosialisasi, layanan VCT, sampai promosi kesehatan untuk remaja, itu ada payung hukumnya" Ungkap Ibu Betty

Pandangan ini diperkuat oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang yang menyatakan bahwa kalau tidak ada aturan jelas, kita akan sulit dalam bekerja, apalagi menyangkut isu sensitif seperti HIV. Dengan adanya Peraturan Walikota dan Peraturan Menteri Kesehatan, kita punya dasar hukum yang kuat. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan program menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Selain faktor regulasi, dukungan lintas lembaga dan koordinasi antarinstansi juga menjadi aspek penting yang mendorong keberhasilan kebijakan ini. Program pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Padang melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP, sekolah, rumah sakit, Bappeda, dan lembaga swadaya masyarakat. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Padang menyebutkan:

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ada dukungan dari rumah sakit, puskesmas, pihak sekolah, bahkan LSM yang ikut membantu sosialisasi maupun layanan VCT. Jadi bentuk dukungan lintas sektor ini yang membuat program bisa berjalan" Ungkao Kepala Seksi

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Kunci keberhasilan program HIV ada pada kerja sama. Satpol PP membantu ketika ada razia, Bappeda mendukung dalam perencanaan anggaran, sekolah membuka akses edukasi remaja, dan rumah sakit memberikan layanan rujukan. Dukungan dan kolaborasi tersebut menciptakan sinergi antarlembaga yang memperkuat efektivitas kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV di masyarakat.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan dana dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pemerintah Kota Padang melalui APBD dan bantuan dari program nasional telah menyediakan alokasi dana yang cukup besar untuk mendukung kegiatan pencegahan HIV, seperti pengadaan alat tes, penyediaan obat ARV, media informasi, serta pelatihan tenaga kesehatan. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menjelaskan Kegiatan pencegahan HIV ini ada dukungan dana, baik dari APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat. Kalau tidak ada anggaran, tentu susah untuk melaksanakan sosialisasi, pengadaan alat tes, maupun kegiatan lainnya. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan menambahkan Dana digunakan tidak hanya untuk alat tes, tapi juga untuk media informasi, pelatihan tenaga, hingga distribusi ARV. Dengan adanya dukungan dana dan fasilitas, layanan VCT dan terapi ARV dapat diakses masyarakat secara lebih luas dan berkesinambungan, sehingga memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Namun di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan HIV. Banyak masyarakat enggan melakukan tes VCT karena takut dianggap memiliki perilaku berisiko atau karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini. Hal ini diungkapkan oleh staf dan Sekretaris program HIV Dinas Kesehatan Kota Padang:

"Kendala besar kita itu stigma. Masyarakat banyak yang takut ikut tes VCT karena khawatir dianggap punya perilaku berisiko. Padahal tes ini penting untuk pencegahan" Ungkap Staff

juga menyatakan: "Masyarakat kita masih banyak yang memandang HIV sebagai penyakit aib. Jadi kalau ada program tes, mereka cenderung menolak atau pura-pura tidak tahu" Ungkap Sekretaris Dinas Kesehatan

Selain rendahnya partisipasi, faktor stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) juga menjadi hambatan serius yang menghalangi keberhasilan kebijakan. Stigma sosial membuat banyak ODHA merasa terisolasi dan enggan terbuka terhadap kondisinya. Seorang staf program HIV menyampaikan Selama stigma ini masih ada, program kita sulit maksimal. Banyak yang takut ikut tes HIV karena takut dicap negative. Sekretaris Dinas Kesehatan juga menegaskan bahwa ODHA masih sering diperlakukan berbeda, bahkan ada yang dijauhi oleh lingkungannya. Situasi ini membuat masyarakat semakin enggan untuk memeriksakan diri. Salah satu ODHA menuturkan:

"Kalau orang tahu saya positif, biasanya sikapnya berubah. Ada yang tidak mau lagi dekat atau segan berinteraksi" Ungkapnya

Hambatan berupa stigma dan diskriminasi ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pencegahan HIV di Kota Padang bukan hanya aspek teknis atau kelembagaan, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan edukatif dan perubahan pola pikir masyarakat secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam menangani kasus HIV berdasarkan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2018 menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menurunkan angka penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Strategi ini mencakup lima pilar utama: promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, serta rehabilitasi. Sesuai dengan teori (Kiwang et al., 2015), implementasi strategi bukan hanya sekadar pelaksanaan teknis, melainkan juga proses manajerial yang melibatkan pengorganisasian, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan bertindak sebagai pelaksana utama yang menggerakkan sistem kesehatan daerah agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Namun, sebagaimana

hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan strategi ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya dan hambatan sosial. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Budiawan, 2023) di Palu, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan HIV sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menyesuaikan program dengan konteks sosial budaya setempat. Dengan demikian, implementasi strategi di Padang harus memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan moral masyarakat Minangkabau yang religius dan beradab.

Dari sisi pelaksana, peran Dinas Kesehatan Kota Padang melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menjadi elemen kunci dalam menjalankan strategi ini. Unit ini bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, dan organisasi masyarakat seperti LSM peduli AIDS. Berdasarkan wawancara dengan staf dinas, Ibu Betty, hingga tahun 2024 tercatat 311 kasus HIV, dengan 281 pasien aktif menjalani terapi ARV. Namun, kasus baru masih terus muncul, terutama di kelompok non-populasi kunci seperti ibu rumah tangga dan remaja. Menurut teori (Amir, 2015), keberhasilan implementasi strategi sangat ditentukan oleh kompetensi pelaksana, baik dari aspek teknis maupun komitmen moral. Penelitian (Winanda & Mubarak, 2020) juga menemukan bahwa pelaksana yang memiliki pemahaman mendalam terhadap substansi kebijakan mampu menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat. Maka dari itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Kesehatan dan puskesmas menjadi kebutuhan utama agar pelaksanaan strategi berjalan efektif dan berorientasi pada hasil.

Konten kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sejatinya telah mengacu pada lima pilar Perwako No. 23 Tahun 2018. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus kegiatan masih terpusat pada aspek promotif dan kuratif, sementara aspek edukatif dan rehabilitatif belum optimal. Misalnya, kegiatan promosi kesehatan hanya dilakukan pada momentum seremonial seperti Hari AIDS Sedunia tanpa adanya program berkelanjutan di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan warga Air Tawar, Fatma, yang menyatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan langsung mengenai HIV. Secara teoritis, (Amir, 2015) menegaskan bahwa konten strategi harus adaptif terhadap kebutuhan lokal agar kebijakan dapat berjalan efektif. Penelitian (Putri & Sari, 2021) di Surakarta juga mendukung pandangan ini, bahwa efektivitas program HIV meningkat ketika materi sosialisasi dikontekstualisasikan dengan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, isi strategi di Padang perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan karakteristik masyarakat Minangkabau agar pesan kesehatan lebih mudah diterima.

Dalam aspek implementasi teknis, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti layanan VCT, penyediaan ARV, dan pendampingan ODHA. Namun, efektivitas pelaksanaan ini masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarunit dan sistem pelaporan kasus. Beberapa puskesmas mengalami kendala dalam sinkronisasi data dengan dinas, sehingga penanganan pasien sering terlambat. Teori (Amir, 2015) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas pengorganisasian dan mekanisme evaluasi. Kondisi ini serupa dengan penelitian (Bella & Wibowo, 2025) di Medan yang menemukan bahwa birokrasi yang panjang dan sistem pelaporan manual sering memperlambat tindakan cepat terhadap kasus HIV, sehingga itu, Dinas Kesehatan Padang perlu memperkuat sistem pelaporan berbasis digital (digital-based monitoring system) agar proses pengawasan menjadi lebih efisien dan akurat.

Faktor komunikasi menjadi salah satu kunci penting dalam teori George C. Edward III, karena keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana pesan kebijakan disampaikan secara jelas dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Huda & Fidhayanti, 2021). Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan komunikasi kebijakan di Kota Padang masih bersifat satu arah dan kurang membuka ruang dialog. Sosialisasi yang dilakukan cenderung formal dan tidak menyentuh lapisan masyarakat bawah, seperti di Kecamatan Kuranji atau Lubuk Kilangan. Hal ini menyebabkan masyarakat masih memandang HIV sebagai penyakit moral, bukan masalah kesehatan publik. Teori Edward III menekankan pentingnya transmisi pesan yang konsisten dan disesuaikan dengan karakter sosial penerima. Penelitian (Pratama & Gurning, 2020) di Medan juga menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak menggunakan pendekatan kultural menyebabkan masyarakat sulit menerima pesan pencegahan HIV. Dari itu, diperlukan pendekatan komunikasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama dan pemuda agar pesan lebih diterima secara sosial.

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga memainkan peran penting dalam implementasi strategi. Berdasarkan teori Edward III, sumber daya mencakup manusia, anggaran, sarana, dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala utama di Kota Padang. Banyak puskesmas tidak memiliki petugas khusus HIV, sehingga program masih digabung dengan penyakit lain. Kondisi ini berdampak pada kurangnya intensitas pendampingan pasien dan rendahnya edukasi masyarakat. Penelitian (Rohayati & Kartini, 2019) di Bandung menemukan bahwa kekurangan tenaga konselor HIV menyebabkan penurunan efektivitas program tes sukarela. Maka dari itu, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan perekrutan tenaga

khusus menjadi sangat penting. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan alokasi dana APBD agar tidak tergantung sepenuhnya pada hibah nasional atau donor internasional.

Masalah sumber daya tidak hanya mencakup jumlah, tetapi juga kualitas pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ODHA, masih ada tenaga medis yang kurang empatik dalam memberikan pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sikap dan pengetahuan (attitude gap) yang dapat memengaruhi kualitas implementasi. Edward III menekankan bahwa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis namun tidak memiliki empati sosial dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Sirait & Silaban, 2025) di Bali menegaskan pentingnya pelatihan berbasis komunikasi empatik bagi tenaga medis untuk mengurangi stigma terhadap ODHA. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Padang perlu memperluas pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga komunikasi sosial dan dukungan psikologis bagi pasien.

Faktor disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi elemen penting dalam teori Edward III. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan di Kota Padang memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan HIV, namun motivasi kerja mereka sering menurun karena beban kerja yang tinggi dan minimnya insentif. Dalam teori Edward III, disposisi pelaksana yang rendah dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan bersifat minimalis atau formalitas semata. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Indra & Riki Rinaldi, 2024) di Palembang yang menemukan bahwa rendahnya motivasi pelaksana berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan layanan HIV. Untuk itu, diperlukan kebijakan penghargaan berbasis kinerja serta dukungan psikologis bagi pelaksana yang menghadapi tekanan sosial. Dinas Kesehatan perlu menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi individu agar komitmen moral para pelaksana tetap stabil dalam jangka panjang.

Struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kota Padang juga turut menentukan efektivitas implementasi strategi. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi masih belum optimal karena jalur pelaporan yang panjang dan hierarkis. Proses verifikasi data kasus HIV sering memakan waktu lama, sehingga penanganan menjadi tidak responsif. Dalam teori Edward III, struktur birokrasi yang kaku dapat menghambat fleksibilitas pelaksana dan mengurangi efektivitas kebijakan. Penelitian (Destania Putri Irawan et al., 2024) mendukung hal ini, di mana struktur birokrasi yang terfragmentasi menyebabkan kurangnya koordinasi

lintas sektor dalam program HIV. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memperpendek rantai koordinasi dan memperkuat sistem kerja horizontal antarunit.

Dalam konteks implementasi kebijakan HIV di Padang, faktor koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian penting. Dinas Kesehatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari dinas pendidikan, dinas sosial, dan organisasi masyarakat. Namun, kerja sama yang ada saat ini masih bersifat proyek jangka pendek, bukan sinergi jangka panjang. Hal ini mengakibatkan kegiatan promosi kesehatan dan rehabilitasi ODHA tidak berkelanjutan. Penelitian (Jazuli et al., 2023) menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang kuat mampu menurunkan angka infeksi baru HIV dalam satu tahun termasuk juga bagian kunci kesuksesan sebuah program. Untuk itu, pembentukan task force lintas sektor di Kota Padang menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dan masyarakat sipil.

Selain aspek struktural, faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau turut memengaruhi implementasi strategi. Masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi norma adat sering kali menilai HIV sebagai akibat dari perilaku menyimpang, sehingga timbul stigma terhadap penderita. Stigma ini menyebabkan banyak individu enggan melakukan pemeriksaan atau mengakses layanan kesehatan. Dalam teori implementasi Edward III, faktor eksternal seperti nilai sosial dan budaya merupakan variabel yang dapat memperkuat atau justru menghambat keberhasilan kebijakan. Penelitian (Jaksa, 2024) di SMP menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai agama mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pencegahan HIV, sehingga itu, Dinas Kesehatan Padang sebaiknya menggandeng ulama, ustaz, dan tokoh adat dalam menyusun strategi komunikasi agar program diterima secara kultural.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2018 telah berjalan namun belum optimal. Faktor pendukung seperti komitmen pelaksana dan dukungan kelembagaan sudah ada, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi, dan struktur birokrasi yang panjang. Berdasarkan teori Amir dan Edward III, keberhasilan implementasi menuntut sinergi antara isi kebijakan, pelaksana, sumber daya, dan konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia, peningkatan komunikasi berbasis komunitas, dan integrasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

strategi penanggulangan HIV di Kota Padang dapat menjadi model implementasi kebijakan kesehatan daerah yang efektif dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi Dinas Kesehatan Kota Padang dalam menangani kasus HIV sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2018 telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk promosi kesehatan, pencegahan transmisi seksual, layanan VCT, terapi ARV, dan edukasi remaja di sekolah. Meskipun memiliki dasar hukum dan arah pelaksanaan yang jelas, efektivitas implementasi masih terbatas karena adanya kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang kurang solid, serta struktur birokrasi yang panjang. Faktor sosial seperti stigma terhadap ODHA dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tes dini juga memperburuk efektivitas program. Menurut teori George C. Edward III dan Amir, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan strategi, namun saat ini aspek-aspek tersebut belum optimal. Maka dari itu, diperlukan penguatan komunikasi berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penambahan sumber daya, serta penyederhanaan birokrasi agar program penanggulangan HIV lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam menekan angka kasus HIV di Kota Padang. Adapun penghambatnya yakni komunikasi kebijakan yang bersifat top-down dan kurang berbasis komunitas menyebabkan pesan kesehatan belum sepenuhnya diterima masyarakat. Struktur birokrasi yang panjang dan koordinasi lintas sektor yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan strategi. Faktor sosial budaya dan stigma terhadap ODHA turut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program HIV. Selain itu, aspek evaluasi dan monitoring belum sepenuhnya berbasis hasil, sehingga keberhasilan program lebih diukur dari aktivitas daripada dampak nyata. Penguatan pelaksana melalui pelatihan, dukungan psikososial, serta reformasi birokrasi menjadi kunci perbaikan implementasi. Secara keseluruhan, keberhasilan strategi ini menuntut integrasi antara sumber daya, komunikasi efektif, koordinasi lintas sektor, dan adaptasi terhadap konteks sosial budaya lokal.

Kontribusi Penelitian ini memberikan pemahaman implementasi strategi penanggulangan HIV oleh Dinas Kesehatan Kota Padang berdasarkan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2018. Secara teoritis, penelitian ini menguatkan pemahaman tentang faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sesuai dengan kerangka George C. Edward III. Secara praktis, penelitian ini menyoroti kendala nyata di lapangan, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, birokrasi yang panjang, serta stigma sosial terhadap ODHA, sehingga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan strategi, seperti penguatan komunikasi berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas sumber daya, dan penyederhanaan struktur koordinasi. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam penyusunan program HIV, sehingga strategi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak nyata pada perubahan perilaku masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) mengeksplorasi secara lebih mendalam efektivitas pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam penanggulangan HIV, khususnya pada kelompok populasi kunci dan remaja di Kota Padang. 2) Meneliti peran tokoh agama, pemuda, dan kader lokal sebagai agen komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap ODHA. 3) Mengkaji pemanfaatan media digital dan teknologi informasi secara lebih sistematis dalam menyampaikan edukasi HIV yang sesuai konteks sosial-budaya. 4) Menilai efektivitas integrasi kurikulum edukasi HIV di sekolah dan dampaknya terhadap kesadaran remaja. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi strategi penanggulangan HIV di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. T. (2015). *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*. Rajawali Pers.

Bella, L. A. S., & Wibowo, H. (2025). Etika Administrasi Kesehatan dalam Penerapan SOP: Menjaga Profesionalisme di Tengah Birokrasi Kesehatan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(3), 1439. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/795

Budiawan, M. S. (2023). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Wilayah Kerja Puskesmas Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu* [Universitas Hasanuddin]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39900/

Destania Putri Irawan, Damayanti Suhita, & Wirid Winduro. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Surakarta No 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *2*(2), 151–161. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1098

Ekayamti, E., Rohmawati, D. L., & Komalawati, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan Jiwa Serta Kepedulian Terhadap Kelompok Resiko dan Gangguan Jiwa. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, *6*(2), 109–118. https://doi.org/10.31596/jpk.v6i2.254

Hasibuan, A., Maulana, M. F. Z., & Mauliah, S. (2024). Melonjaknya Kasus HIV Dikalangan Remaja Indonesia. *Amsir Community Service Journal*, *2*(1), 1–8. https://doi.org/10.62861/acsj.v2i1.392

Huda, M. F., & Fidhayanti, D. (2021). Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III. *Ournal of Islamic Business Law*, *5*(3), 130. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2216

Indra, S., & Riki Rinaldi. (2024). Lindungi Remaja Melalui Peningkatan Pengetahuan Seputar HIV/AIDS Dan Pencegahannya Di SMK Kesehatan Kader Bangsa Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, *3*(1), 132–138. https://doi.org/10.54832/judimas.v3i1.395

Jaksa, S. (2024). Penguatan Nilai Qs Al Ma'un dalam Program Kesehatan untuk Pencegahan Penyakit Menular di Kalangan Remaja SMP Islam Al- Husna. *AS-SYIFA: JURNAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT*, *5*(2), 129. https://doi.org/10.24853/assyifa.5.2.78-73

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, *8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Kemenkes. (2020). *Strategi Nasional Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia*. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes RI.

Kemenkes. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia 2023 Dalam Angka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Kemenkes Republik Indonesia.

Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *19*(1), 71. https://doi.org/10.22146/jkap.7535

Mahy, M. I., Sabin, K. M., Feizzadeh, A., & Wanyeki, I. (2021). Progress towards 2020 global HIV impact and treatment targets. *Journal of the International AIDS Society*, *24*(S5), 4201. https://doi.org/10.1002/jia2.25779

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Pratama, M. Y., & Gurning, F. P. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI PUSKESMAS HELVETIA KOTA MEDAN. *Indonesian Trust Health Journal*, *2*(2), 252–257. https://doi.org/10.37104/ithj.v2i2.42

Putri, N. H., & Sari, R. P. (2021). Efektivitas Program Warga Peduli Aids (Wpa) Dalam Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *2*(2), 109–118. https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/3142

Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS*, *4*(01). https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431

Sirait, R. A., & Silaban, M. (2025). Improving Education and Prevention of HIV/AIDS Transmission Among Transgender Women Through Integrated Services at Lubuk Pakam Public Health Center, Deli Serdang Regency. *JURNAL PENGMAS KESTRA (JPK)*, *5*(1), 89. https://doi.org/10.35451/jxqtjd88

Suci Frisnoiry, Julisa Ayu Lestari, Cut Rania Andini, & Putri Br Tarigan. (2024). Analisis Peningkatan Kasus HIV/AIDS Di Kota Medan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Untuk Pencegahan Dan Edukasi. *Bilangan : Jurnal Ilmiah Matematika, Kebumian Dan Angkasa*, *2*(2), 17–22. https://doi.org/10.62383/bilangan.v2i2.35

Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Winanda, Y., & Mubarak, A. (2020). Implementasi Strategi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *2*(2), 18–25. http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/issue/view/7

Yanti, F., Lestari, Y., & Yetti, H. (2020). Analisis Implementasi Program Penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Bungus Kota Padang Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, *11*(2), 112–122. https://doi.org/10.30633/jkms.v11i2.847